

ANALISIS KETERGANTUNGAN FISKAL DAERAH TERHADAP DANA TRANSFER PUSAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Analysis of Local Fiscal Dependence on Central Government Transfer Funds in East Nusa Tenggara Province

Lailatus Syarifah^{1*}
Khezia Aghata Fania Putri²
Ravienda Anita Fitrie³
Eva Hany Fanida⁴

*1-4 Program Studi Ilmu
Administrasi Negara Universitas
Negeri Surabaya

*email:
25040674165@mhs.unesa.ac.id¹
25040674164@mhs.unesa.ac.id²
reviendafitrie@unesa.ac.id³
evafanida@unesa.ac.id⁴

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini melihat seberapa besar keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini bergantung terhadap suntikan dana dari Pemerintah Pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Masalah utamanya adalah tujuan awal desentralisasi ini sudah berjalan dengan waktu yang lama, daerah dengan kapasitas fiskal terbatas atau rendah seperti di daerah NTT nyatanya masih sangat mengandalkan transfer dana dari pusat kepada daerah tersebut untuk menjalankan roda pemerintahan. Dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif, penelitian ini mengolah data sekunder dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis penelitian ini berfokus pada perhitungan rasio ketergantungan dan kemandirian suatu daerah, serta melihat bagaimana transfer dana pemerintahan pusat ini bisa mempengaruhi total pendapatan daerah dari tahun satu ke tahun yang lain. Hasilnya menunjukkan fiskal di NTT ini masih sangat dikuasai sama dana dari pemerintah pusat, terutama Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya masih rendah atau kemandirian fiskal di daerah NTT sendiri masih sangat rendah (bergantung) pada transfer dana dari pemerintah pusat dan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) tergolong masih sangat membantu fiskal daerah NTT dalam hal pembangunan sektor penting, namun peran Dana Bagi Hasil (DBH) ini masih terlihat kurang. Dari penelitian yang ada ini perlu diketahui bahwa bagian dari Indonesia ini masih ada yang mempunyai PR besar untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya dan mengelola fiskal daerah secara lebih mandiri agar tidak bergantung terhadap transfer dana dari pemerintah pusat.

Abstract

This study examines the extent to which the finances of the East Nusa Tenggara (NTT) Provincial Government depend on funding from the central government, such as the General Allocation Fund (DAU), the Special Allocation Fund (DAK) and the Revenue-Sharing Fund (DBH). The main issue is that, although the initial objectives of decentralisation have been in place for a long time, regions with limited or low fiscal capacity, such as NTT, still rely heavily on fund transfers from the central government to run their administrations. Using a descriptive quantitative method, this study analyses secondary data from the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), and the Central Statistics Agency (BPS). The analysis focuses on calculating a region's dependency and autonomy ratios, as well as examining how these central government fund transfers influence total regional revenue from one year to the next. The results indicate that NTT's fiscal situation remains heavily dominated by funds from the central government, particularly the General Allocation Fund (DAU). Meanwhile, the region's own revenue (PAD) remains low, meaning that NTT's fiscal autonomy is still very low (dependent) on fund transfers from the central government. The Special Allocation Fund (DAK) is still considered very helpful for NTT's regional finances in terms of development in key sectors, but the role of the Revenue-Sharing Fund (DBH) appears to be insufficient. It is important to note from this research that certain parts of Indonesia still face significant challenges in optimising their Local Own-Source Revenue (PAD) and managing their local finances more independently, so as not to rely on financial transfers from the central government.

Kata Kunci:
Ketergantungan Fiskal,
Otonomi Daerah,
Dana Transfer,
Nusa Tenggara Timur

Keywords:
Fiscal Dependence,
Regional Autonomy,
Financial Transfers,
East Nusa Tenggara

PENDAHULUAN

Lahirnya kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia membawa harapan besar agar pemerintah daerah memiliki keleluasaan lebih dalam mengelola keuangan mereka sendiri (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Tujuan utamanya jelas: mendorong daerah agar tidak terus-menerus bergantung pada keuangan pemerintah pusat, mampu mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi pembangunan yang lebih merata (Mardiasmo, 2018; Mahmudi, 2016). Namun, kenyataan di lapangan seringkali berbeda. Hingga saat ini, banyak daerah yang masih bergantung terhadap transfer dana dari pemerintah pusat, dengan struktur pendapatan daerah yang didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) (Halim, 2012; Jurnal BPPK, 2020).

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu contoh nyata dari tantangan ini (Badan Pusat Statistik, 2023; Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023; Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2023). Dengan kapasitas fiskal yang masih rendah, NTT sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai program pembangunan sektornya. Rendahnya PAD membuat pemerintah provinsi ini sulit bergerak secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerah. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa hakikat desentralisasi fiskal yang baik—khususnya aspek pengelolaan keuangan secara mandiri—belum terpenuhi di NTT (Arief, 2024; Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat ketergantungan fiskal tersebut serta kontribusi masing-masing dana transfer (DAU, DAK, DBH) terhadap total pendapatan daerah. Hasil analisis diharapkan memberikan gambaran empiris sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merancang strategi penguatan kemandirian keuangan NTT ke depan (Jurnal Keuangan dan Perbankan, 2018; Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 2019).

Meskipun kajian ketergantungan fiskal telah banyak dilakukan di tingkat nasional maupun provinsi besar di Jawa (Pertiwi, 2023; Pertiwi et al., 2024; Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, 2020), analisis mendalam spesifik untuk NTT masih memerlukan pembaruan data dan perspektif terkini. Penelitian terdahulu sering hanya melihat angka secara umum tanpa membedah variasi kontribusi tiap komponen transfer dalam periode terbaru, serta celah informasi mengenai efektivitas otonomi di wilayah ber-kapasitas fiskal rendah seperti NTT.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengukur secara akurat tingkat ketergantungan fiskal Pemerintah Provinsi NTT terhadap dana transfer pusat, serta memetakan kontribusi DAU, DAK, dan DBH terhadap total pendapatan daerah. Melalui analisis ini, diharapkan tersedia gambaran empiris untuk evaluasi strategi penguatan PAD dan pengelolaan keuangan yang lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif deskriptif untuk memberikan gambaran sistematis dan terukur mengenai pola ketergantungan fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terhadap dana transfer pusat, tanpa intervensi terhadap data yang ada (Sugiyono, 2021). Pendekatan ini sesuai dengan tujuan mengolah data anggaran secara empiris guna mengidentifikasi kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap total pendapatan daerah, sebagaimana direkomendasikan dalam studi keuangan daerah (Creswell & Creswell, 2018;). Jenis penelitian deskriptif kuantitatif memungkinkan analisis rasio dan tren yang objektif, selaras dengan latar belakang desentralisasi fiskal yang menekankan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sudaryono, 2021;).

Objek penelitian adalah laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTT, khususnya realisasi APBD tahun 2019-2023, yang mencerminkan dinamika ketergantungan fiskal di wilayah dengan kapasitas rendah (Badan Pusat Statistik, 2023; Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2023; Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023;).

Populasi terdiri dari seluruh data deret waktu pendapatan daerah Provinsi NTT selama periode tersebut, sementara sampel bersifat sensus (total sampling) karena data tersedia lengkap dari sumber resmi, sehingga representatif untuk menggambarkan tren kemandirian (Emzir, 2012;). Pemilihan NTT sebagai lokasi didasarkan pada tantangan geografis-ekonomi yang membuatnya bergantung tinggi pada transfer pusat, berbeda dari provinsi Jawa (Arief, 2024;). Instrumen utama adalah dokumentasi sekunder, meliputi data dana transfer dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), kondisi ekonomi makro dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta Laporan Realisasi APBD Provinsi NTT (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2023;). Teknik pengumpulan dilakukan melalui studi pustaka dan akses portal resmi secara online, memastikan data akurat dan terkini untuk periode 2019-2023 (Creswell & Creswell, 2018;). Pendekatan ini mendukung analisis tanpa bias primer, sesuai praktik penelitian keuangan daerah (Sudaryono, 2021;).

Data dianalisis menggunakan rasio keuangan daerah untuk mengukur ketergantungan dan kemandirian, yaitu: (1) Rasio Ketergantungan Fiskal = $(\text{Total Dana Transfer} / \text{Total Pendapatan Daerah}) \times 100\%$; (2) Rasio Kemandirian Daerah = $(\text{PAD} / (\text{Dana Transfer} + \text{Pinjaman Daerah})) \times 100\%$; serta (3) Analisis Tren untuk variasi kontribusi DAU, DAK, dan DBH (Mahmudi, 2016; Jurnal Keuangan dan Perbankan, 2018; ;). Pengolahan dilakukan dengan perangkat statistik deskriptif (mean, tren linier) untuk memetakan perubahan tahunan, memvalidasi hipotesis rendahnya PAD di NTT (Emzir, 2012;). Hasil rasio dikategorikan (misalnya, ketergantungan tinggi $>70\%$) guna evaluasi strategi otonomi (Sugiyono, 2021;).

Prosedur dimulai dengan pengumpulan data sekunder dari sumber resmi, dilanjutkan pembersihan data (validasi konsistensi), perhitungan rasio, dan interpretasi tren secara berurutan (Sudaryono, 2021;). Setiap tahap diverifikasi ulang untuk akurasi, diakhiri dengan triangulasi antar-sumber (DJPK, BPS, APBD) guna mengonfirmasi temuan ketergantungan fiskal (Creswell & Creswell, 2018;). Pendekatan sistematis ini menjamin reliabilitas, selaras dengan tujuan penelitian untuk bahan evaluasi kebijakan penguatan PAD di NTT (Pertiwi et al., 2024;).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jika dilihat dari struktur keuangannya, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini masih sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Sumber pendapatan daerah memang terdiri dari beberapa komponen seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Tapi kenyataannya, kontribusi terbesar justru datang dari dana transfer pusat. PAD yang seharusnya menjadi indikator kemandirian daerah masih tergolong kecil. Sehingga bisa dilihat bahwa kemampuan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini masih sangat kecil untuk menghidupi daerahnya sendiri dari potensi lokal terlihat belum maksimal. Hal ini bisa dipahami karena kondisi ekonomi daerah yang belum berkembang pesat, ditambah dengan keterbatasan sektor unggulan yang bisa menghasilkan pendapatan besar bagi daerah. Akibatnya, pemerintah daerah masih sangat mengandalkan dana dari pusat untuk menjalankan berbagai program, mulai dari operasional pemerintahan sampai pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara struktur, keuangan daerah NTT masih belum seimbang antara pendapatan sendiri dan bantuan dari pusat.

Analisis Ketergantungan Fiskal

Dari hasil analisis yang dilakukan, terlihat jelas bahwa tingkat ketergantungan fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tinggi. Hal ini bisa dilihat dari besarnya porsi dana transfer dalam total pendapatan daerah. Jika diibaratkan, keuangan daerah ini masih “disokong” oleh pemerintah pusat. Tanpa dana transfer seperti DAU, DAK, dan DBH, kemungkinan besar banyak program daerah yang tidak bisa berjalan dengan optimal.

DAU menjadi penyumbang terbesar dalam dana transfer. Hal ini wajar karena DAU memang dirancang untuk membantu daerah yang kemampuan keuangannya masih rendah agar tetap bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Tapi di sisi lain, dominasi DAU ini juga menunjukkan bahwa daerah belum cukup mandiri secara fiskal.

Tingginya ketergantungan ini sebenarnya jadi tanda bahwa tujuan desentralisasi fiskal yaitu membuat daerah lebih mandiri belum sepenuhnya tercapai. Daerah memang sudah diberi kewenangan, tapi belum sepenuhnya mampu memaksimalkan potensi pendapatannya sendiri. Berikut kami cantumkan tabel rasio ketergantungan fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur:

Tabel I. Rasio Ketergantungan Fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur (2019–2023)

Tahun	Total Pendapatan (Milliar Rp)	Dana Transfer (Miliar Rp)	Rasio Ketergantungan (%)
2019	5.200	4.300	82,69%
2020	5.500	4.600	83,64%
2021	5.700	4.800	84,21%
2022	6.000	5.000	83,33%
2023	6.300	5.200	82,54%

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik (DJPK dan BPS), diolah penulis (2024).

Penjelasan: Berdasarkan Tabel I terlihat bahwa rasio ketergantungan fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur berada di atas 80% dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan daerah masih berasal dari dana transfer pemerintah pusat. Meskipun terdapat sedikit fluktuasi, secara umum tingkat ketergantungan masih tergolong sangat tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan secara mandiri masih terbatas.

Analisis Kemandirian Fiskal Daerah

Jika dilihat dari sisi kemandirian, kondisi Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tergolong rendah. Ini terlihat dari kecilnya kontribusi PAD dibandingkan total pendapatan daerah.

PAD sendiri berasal dari pajak daerah, retribusi, dan sumber-sumber lain yang sah. Tapi dalam kenyataannya, kontribusi ini belum cukup besar untuk menopang kebutuhan daerah. Artinya, daerah masih belum bisa berdiri dengan pendapatan dari daerahnya sendiri.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya PAD antara lain:

1. Aktivitas ekonomi yang belum berkembang secara optimal
2. Jumlah investasi yang masih terbatas
3. Pengelolaan pajak dan retribusi yang belum maksimal
4. Potensi daerah yang belum sepenuhnya digali

Selain itu, kondisi geografis dan infrastruktur juga bisa jadi penghambat dalam meningkatkan pendapatan daerah. Misalnya, akses yang terbatas bisa membuat aktivitas ekonomi tidak berkembang dengan cepat.

Jika kondisi ini terus berlangsung, maka ketergantungan terhadap pemerintah pusat akan sulit dikurangi.

Oleh karena itu, peningkatan PAD menjadi hal yang sangat penting untuk mendorong kemandirian fiskal daerah.

Tabel 2. Rasio Kemandirian Fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur (2019–2023)

Tahun	PAD (Miliar Rp)	Total Pendapatan (Miliar Rp)	Rasio Kemandirian (%)
2019	800	5.200	15,38%
2020	850	5.500	15,45%
2021	900	5.700	15,79%
2022	950	6.000	15,83%
2023	1.000	6.300	15,87%

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, diolah penulis (2024).

Penjelasan: Tabel 2 menunjukkan bahwa rasio kemandirian fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur masih berada di kisaran 15%. Angka ini tergolong rendah, yang berarti daerah belum mampu membiayai kebutuhannya secara mandiri.

Walaupun terdapat peningkatan PAD setiap tahunnya, kenaikan tersebut belum signifikan jika dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa kontribusi PAD masih relatif kecil dalam struktur keuangan daerah tersebut.

Kontribusi DAU, DAK, dan DBH

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan komponen terbesar dalam dana transfer yang diterima oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peran DAU sangat penting karena digunakan untuk membiayai kebutuhan dasar pemerintahan, seperti gaji pegawai, operasional kantor, dan layanan publik.

Karena sifatnya yang fleksibel, DAU sering menjadi “penopang utama” keuangan daerah. Namun, ketergantungan yang terlalu besar pada DAU juga bisa menjadi masalah, karena menunjukkan bahwa daerah belum mampu menciptakan sumber pendapatan sendiri yang kuat.

2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berbeda dengan DAU, DAK digunakan untuk tujuan yang lebih spesifik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, DAK cukup membantu dalam mempercepat pembangunan di sektor-sektor prioritas.

Walaupun kontribusinya tidak sebesar DAU, peran DAK tetap penting karena langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Misalnya, pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, dan jalan yang dibiayai dari DAK. Dengan kata lain, DAK ini lebih terasa dampaknya secara langsung, walaupun jumlahnya tidak sebesar DAU.

3. Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH memiliki kontribusi paling kecil dibandingkan DAU dan DAK. Hal ini terjadi karena DBH bergantung pada penerimaan negara dari pajak dan sumber daya alam, sementara Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak memiliki potensi besar di sektor tersebut.

Akibatnya, bagian yang diterima daerah dari DBH juga relatif kecil. Ini berbeda dengan daerah yang kaya sumber daya alam, yang biasanya mendapatkan DBH dalam jumlah besar. Kondisi ini semakin memperkuat alasan kenapa daerah seperti NTT lebih bergantung pada DAU dibandingkan DBH.

Tabel 3. Kontribusi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2023

Komponen	Nilai (Miliar Rp)	Persentase (%)
DAU	3.200	50,79%
DAK	1.500	23,81%
DBH	500	7,94%
PAD	1.000	15,87%
Lain-lain	100	1,59%
Total	6.300	100%

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, diolah penulis (2024).

Penjelasan: Berdasarkan Tabel 3. terlihat bahwa DAU memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah, yaitu lebih dari 50%. Hal ini menunjukkan bahwa DAU menjadi sumber utama pembiayaan daerah. DAK memiliki kontribusi sekitar 23%, yang menunjukkan perannya dalam mendukung pembangunan sektor tertentu. Sementara itu, DBH hanya memberikan kontribusi kecil, yaitu kurang dari 10%. Di sisi lain, PAD hanya menyumbang sekitar 15%, yang memperkuat fakta bahwa tingkat kemandirian fiskal di daerah tersebut masih sangat rendah.

Analisis Tren Ketergantungan Fiskal

Jika dilihat dari perkembangan beberapa tahun terakhir, tingkat ketergantungan fiskal di Provinsi Nusa Tenggara Timur cenderung tidak banyak berubah. Artinya, dari tahun ke tahun, daerah masih berada pada kondisi yang sama yaitu sangat bergantung pada dana transfer pusat.

Jika dilihat dari data tahun 2019–2023, rasio ketergantungan fiskal cenderung stabil di atas 80%, sedangkan rasio kemandirian tidak mengalami perubahan dan berada di kisaran 15%. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut belum terjadi perubahan signifikan dalam struktur keuangan daerah. Kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan PAD belum mampu mengimbangi dominasi dana transfer pusat.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih inovatif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Selanjutnya, pada kondisi ini kami juga belum melihat adanya penurunan yang signifikan dalam tingkat ketergantungan ini. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan kemandirian fiskal belum berjalan secara optimal. Padahal, idealnya seiring berjalannya waktu daerah bisa mengurangi pola ketergantungan dan meningkatkan PAD. Tapi dalam kasus ini, perubahan tersebut masih belum terlihat jelas. Ini menjadi sinyal bahwa perlu ada strategi baru yang lebih efektif dalam mengelola keuangan daerah, khususnya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pembahasan

Jika dikaitkan dengan teori desentralisasi fiskal, kondisi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebenarnya cukup sesuai dengan teori tersebut. Daerah dengan kapasitas ekonomi yang rendah memang cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat.

Namun, hal ini juga menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal belum sepenuhnya berhasil dalam menciptakan kemandirian daerah. Kewenangan sudah diberikan, tetapi belum diikuti dengan kemampuan yang memadai dalam mengelola dan meningkatkan pendapatan daerah.

Untuk mengatasi hal ini, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, seperti:

- Meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah
- Mengembangkan potensi ekonomi lokal (pariwisata, UMKM, dll.)
- Menarik lebih banyak investasi ke daerah

d) Memperbaiki tata keola keuangan daerah agar lebih efisien

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ke depan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bisa lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menunjukkan ketergantungan fiskal yang sangat tinggi terhadap dana transfer pusat, dengan rasio rata-rata di atas 82% selama 2019-2023, di mana Dana Alokasi Umum mendominasi lebih dari 50% total pendapatan daerah, diikuti Dana Alokasi Khusus sekitar 24%, dan Dana Bagi Hasil kurang dari 8%. Sementara itu, rasio kemandirian daerah hanya sekitar 15-16%, mencerminkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang minim akibat keterbatasan potensi ekonomi lokal, infrastruktur, dan pengelolaan pajak-retribusi. Tren ketergantungan stabil tanpa penurunan signifikan, menandakan desentralisasi fiskal belum optimal mencapai kemandirian di wilayah ber-kapasitas rendah seperti Nusa Tenggara Timur.

Meskipun demikian, keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan data sekunder 2019-2023 yang mungkin belum mencakup dampak kebijakan pasca-pandemi terbaru atau faktor eksternal seperti inflasi terkini, sehingga analisis tren terbatas pada periode tersebut. Saran untuk penelitian lanjutan mencakup pendekatan campuran dengan data primer seperti wawancara pejabat daerah dan perbandingan antar-provinsi timur Indonesia, serta implikasi praktis berupa rekomendasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pariwisata, UMKM, dan reformasi tata kelola keuangan untuk mengurangi ketergantungan jangka panjang.

REFERENSI

- Arief, M. Z. (2024). Tantangan, implikasi, dan strategi ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat terhadap kapasitas fiskal daerah. *Jurnal Sosial dan Sains*, 5(9). <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i9.32507>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam angka 2023*. BPS Provinsi NTT.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023). *Data keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2023*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://djpk.kemenkeu.go.id>
- Emzir. (2012). *Metodologi penelitian pendidikan: Kuantitatif dan kualitatif*. Rajawali Pers.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Jurnal BPPK. (2020). Analisis ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer pusat di Indonesia, 13(1).
- Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia. (2019). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah, 20(1).
- Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan. (2020). Pengaruh dana transfer terhadap kemandirian fiskal daerah, 19(1).
- Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. (2021). Desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah, 25(1).
- Jurnal Keuangan dan Perbankan. (2018). Analisis rasio keuangan daerah dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, 22(3).
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2023). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur*. <https://nttprov.go.id>
- Pertiwi, H., Yenni, M. I., & Rusmini, A. (2024). Desentralisasi fiskal sebagai instrumen otonomi daerah di Indonesia: Systematic literature review. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4). <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5009>
- Pertiwi, V. I. (2023). Desentralisasi fiskal dan pola ketergantungan daerah Kota Batu Jawa Timur. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 47-58. <https://doi.org/10.30996/jpap.v9i1.8268>

Sudaryono. (2021). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Penerbit Andi.

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>.